

## **Jaringan Aktor Ulama dan Media Massa dalam Dinamika Politik Indonesia 1901–1998: Analisis Actor-Network Theory**

*Networks of Ulama and Mass Media Actors in Indonesian Political Dynamics, 1901–1998: An Actor-Network Theory Analysis*

Nanang Mizwar Hasyim<sup>(a)</sup>, Nitra Galih Imansari<sup>(b)</sup>

<sup>(a,b)</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

E-mail : [nanang.hasyim@uin-suka.ac.id](mailto:nanang.hasyim@uin-suka.ac.id), [nitra.imansari1@uin-suka.ac.id](mailto:nitra.imansari1@uin-suka.ac.id)

Dikirim: 14 Mei 2026, Direvisi: 17 Juni 2026, Diterima: 21 Juni 2026,  
Terbit: 28 Juni 2026. Sitasi: Hasyim, N. M., Imansari, N. G. (2026).  
Jaringan Aktor Ulama dan Media Massa dalam Dinamika Politik Indonesia  
1901–1998: Analisis Actor-Network Theory. *Promedia: Public Relation  
dan Media Komunikasi*, 12(1), 309-340

### **Abstract**

*Indonesian political dynamics cannot be fully understood without examining the relational networks between religious scholars and the mass media as key actors in every phase of political change. Unlike previous studies, which tended to view the two in dichotomous terms, this research shifts that approach by viewing religious scholars and the mass media as part of an interconnected network. This study aims to analyse how this network was formed, maintained, and transformed within the dynamics of Indonesian politics from the pre-independence era through to the New Order. The research employs a qualitative approach using a historical method based on a review of academic articles, following the stages of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Data sourced from journal articles and academic publications are analysed using the Actor-Network Theory (ANT) framework, combined with the analytical techniques of Miles and Huberman. The research findings indicate that religious scholars and the mass media do not operate as separate entities, but rather form a network of actors that is symbiotic, non-hierarchical and dynamic, through the four stages of ANT: problematisation, intersement, enrolment and mobilisation. The nature of this network varied across each period: it was revolutionary during the pre-independence era, ideological during the Old Order, and adaptive and defensive yet resilient during the New Order. These findings confirm that*

*Indonesia's political dynamics are best understood through the perspective of actor-network theory, which involves complex interactions between human and non-human actors, as represented and articulated in the academic literature, thereby yielding significant political implications.*

**Keywords:** Actor-Network Theory, Ulama, Mass Media, Political Dynamics, Indonesia

---

## **ABSTRAK**

Dinamika politik Indonesia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelusuri jaringan relasional antara ulama dan media massa sebagai aktor kunci dalam setiap fase perubahan politik. Berbeda dari kajian terdahulu yang cenderung menempatkan keduanya secara dikotomis, penelitian ini menggeser pendekatan tersebut dengan melihat ulama dan media massa sebagai bagian dari formasi jaringan yang saling terhubung. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana jaringan tersebut dibentuk, dipertahankan, dan ditransformasikan dalam dinamika politik Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan hingga Orde Baru. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis berbasis literatur artikel ilmiah melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Data yang bersumber dari artikel jurnal dan publikasi akademik dianalisis menggunakan kerangka Teori Aktor Jaringan atau Actor-Network Theory (ANT) yang dipadukan dengan teknik analisis Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama dan media massa tidak beroperasi sebagai entitas yang terpisah, melainkan membentuk jaringan aktor yang bersifat simbiotik, non-hierarkis, dan dinamis melalui empat tahapan ANT, yaitu problematisasi, interessement, enrolment, dan mobilisasi. Karakter jaringan tersebut bervariasi pada setiap periode: bersifat revolusioner pada masa pra-kemerdekaan, ideologis pada masa Orde Lama, serta adaptif dan defensif namun tetap resilien pada masa Orde Baru. Temuan ini menegaskan bahwa dinamika politik Indonesia lebih tepat dipahami melalui perspektif jaringan aktor yang melibatkan interaksi kompleks antara aktor manusia dan non-manusia, sebagaimana terepresentasi dan terartikulasikan dalam literatur ilmiah, sehingga menghasilkan implikasi politik yang signifikan.

**Kata Kunci:** Jaringan Aktor, Ulama, Media Massa, Dinamika Politik, Actor-Network Theory, Indonesia

## I. PENDAHULUAN

Dinamika politik Indonesia tidak dapat dipahami secara utuh tanpa menelusuri jaringan relasional antara ulama dan media massa sebagai aktor kunci dalam setiap fase perubahan politik bangsa. Kajian terdahulu mengenai relasi agama dan politik di Indonesia cenderung memperlakukan ulama dan media massa sebagai dua entitas yang terpisah satu sama lain. Pada satu kutub, sejumlah studi mengkaji peran ulama sebagai aktor politik—baik dalam mobilisasi massa, keterlibatan dalam partai politik, maupun posisinya dalam perumusan kebijakan negara—tanpa menempatkan media massa sebagai bagian dari analisis (A. Hidayat, 2019; Lavan, 2021; Padmo, 2012). Pada kutub yang lain, kajian-kajian kesejarahan pers cenderung memotret media massa sebagai aktor independen dalam pembentukan identitas nasional dan opini publik, tanpa menelisik keterkaitannya dengan ulama sebagai salah satu kekuatan yang turut menggerakannya (Peranginangin et al., 2025; Rosyid, 2015). Kecenderungan dikotomis ini menyebabkan relasi ulama dan media massa belum banyak dipahami sebagai satu kesatuan jaringan yang saling membentuk, melainkan sebagai dua jalur kajian yang berjalan sejajar tanpa berpotongan secara analitis.

Berbeda dari kecenderungan tersebut, penelitian ini membuktikan bahwa ulama dan media massa sesungguhnya membentuk jaringan aktor yang bersifat simbiotik, non-hierarkis, dan dinamis, saling mengonstruksi peran, memperkuat legitimasi, dan memobilisasi kekuatan politik secara kolektif. Dengan memposisikan diri dalam kerangka Actor-Network Theory (ANT), kajian ini mengisi celah epistemologis dalam studi politik Islam Indonesia yang belum menganalisis relasi keduanya sebagai satu kesatuan jaringan yang utuh. Penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana ulama dan media massa membentuk, mempertahankan, dan mentransformasi jaringan aktor dalam dinamika politik Indonesia Sejak tahun 1901, Ketika kesadaran pers pribumi mulai tumbuh pada awal abad ke-20 sebagai prasyarat material bagi terbentuknya jaringan ulama dan media, hingga berakhirnya Orde Baru pada tahun 1998.

Bagi negara dengan mayoritas penduduk muslim seperti Indonesia, hubungan antara ulama dan politik memiliki keterkaitan

yang sangat erat. Ulama bukan hanya berperan sebagai agen pembangunan, tetapi juga merupakan salah satu kekuatan sosial berbasis agama yang memiliki pengaruh signifikan (Araniri et al., 2023). Lavan menegaskan bahwa ulama merupakan agen yang memiliki otoritas besar dalam kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat (Lavan, 2021). Modal otoritas yang dimiliki para ulama menjadi peluang besar dalam mempengaruhi masyarakat untuk bersikap dan bertindak, baik dalam interaksi sosial maupun politik. Namun, otoritas ini tidak beroperasi dalam ruang hampa, melainkan termediasi dan diperkuat melalui berbagai saluran komunikasi, terutama media massa.

Peran ulama sebagai aktor politik dapat ditelusuri sejak masa pra-kemerdekaan. Pada periode ini, ulama berperan penting dalam menanamkan rasa nasionalisme sebagai spirit perlawanan terhadap penjajah (Latief, 2003). Selain sebagai aktor politik, ulama juga berperan sebagai agen penggerak umat Islam yang menghalangi motif politik dan kristenisasi yang dilakukan oleh bangsa penjajah (Kusuma, 2020). Hal ini menjadi pemicu terjadinya pemberontakan-pemberontakan umat Muslim yang dimotori oleh para ulama di Nusantara. Menariknya, mobilisasi massa yang dilakukan ulama pada periode ini tidak terlepas dari peran media massa sebagai alat penyebaran ide dan propaganda. Tonggak ini bertepatan dengan kebangkitan pers pribumi pada awal abad ke-20. Pada tahun 1901, Tirta Adhi Soerjo mulai aktif dalam dunia jurnalistik dan kemudian mendirikan *Medan Prijaji*, yang menjadi inspirasi bagi lahirnya berbagai media pergerakan, termasuk yang berafiliasi dengan organisasi Islam seperti Sarekat Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menetapkan tahun 1901 sebagai awal periodisasi, bukan karena berdirinya organisasi ulama tertentu, melainkan karena menandai munculnya pers pribumi yang kemudian berkembang menjadi fondasi jaringan ulama dan media pada masa berikutnya.

Pada masa pasca-kemerdekaan, peran ulama dalam dinamika politik mengalami transformasi. Perbedaan pandangan tentang konsep dan bentuk negara menghasilkan peran ulama yang beragam dalam politik kebangsaan. Pada satu sisi, ulama yang sependapat dengan Presiden Soekarno diposisikan sebagai organisator, penasehat

pemerintah, dan legislator yang memberikan legitimasi terhadap pemerintahan terpilih (A. Hidayat, 2019). Lavan menegaskan bahwa peran ulama sebagai aktor politik pada masa orde lama dan orde baru terbukti dari keterlibatan aktif mereka dalam partai politik maupun organisasi masyarakat (Lavan, 2021, pp. 53–55). Keterlibatan ini didorong oleh motif untuk memastikan nilai-nilai Islam tetap terakomodasi dalam perumusan produk hukum berupa undang-undang dan peraturan pemerintah (Effendy, n.d., pp. 15–17), sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga kedaulatan dan stabilitas negara. Pada tafsir yang berbeda, Padmo melihat bahwa pada masa orde baru peran ulama lebih diposisikan sebagai dai karena sistem pemerintahan otoriter yang menganggap keberadaan ulama sebagai ancaman bagi keberlanjutan rezim (Padmo, 2012).

Di sisi lain, media massa juga memiliki peranan signifikan sebagai aktor dalam dinamika politik Indonesia. Rosyid menegaskan bahwa sejak awal keberadaannya, pers di Indonesia tidak hanya berperan sebagai refleksi sejarah, budaya, dan politik, tetapi juga sebagai aktor yang membantu dalam proses pembentukan bangsa (Rosyid, 2015). Paranginangin et.al menambahkan bahwa kekuatan media massa terletak pada kemampuannya dalam proses saling mempengaruhi, menyalurkan gagasan, dan membangun opini publik yang mampu menciptakan kohesi sosial (Peranginangin et al., 2025). Dalam konteks hubungan antara media massa dan politik negara, Martini menjelaskan bahwa peran media massa selalu berubah sesuai tiga faktor: sistem politik dan pemerintahan yang berlaku, komitmen dalam mewujudkan kepentingan bersama, dan visi positif dari pemilik modal (Martini, 2014). Senada dengan itu, Rizha menegaskan bahwa dalam sistem pemerintahan yang demokratis (Rizha, 2018), media dianggap sebagai agen yang mampu mempengaruhi sikap dan perilaku publik, bahkan berfungsi sebagai sarana kampanye dalam kontestasi politik (Lukmantoro, 2012).

Jika dilihat dari perspektif sejarah, perjalanan dinamika politik Indonesia menunjukkan adanya keterkaitan erat antara ulama dan media massa yang membentuk jaringan aktor. Pada masa menjelang kemerdekaan, banyak gerakan ulama yang terorganisir mendirikan lembaga pers, seperti Sinar Djawa, Panjangan Warta, dan Saroetomo

yang dimiliki oleh Sarekat Islam, serta empat media yang dimiliki oleh NU dan Muhammadiyah (Efendi, 2020). Fakta ini menunjukkan bahwa ulama dan media massa bukan dua entitas yang terpisah, melainkan saling terkait dalam jaringan yang sama untuk mencapai tujuan politik bersama. Untuk memahami kompleksitas relasi ini diperlukan pendekatan yang tidak melihat ulama dan media massa sebagai aktor terpisah, melainkan sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling terkait dan saling membentuk.

Teori ANT merupakan teori yang muncul sebagai antitesis teori Pierre Bourdieu yang menyatakan bahwa aktor adalah individu manusia (Mustika, 2018). Teori ANT memiliki penjelasan yang berbeda, di mana seorang aktor didefinisikan sebagai sumber tindakan terlepas dari statusnya sebagai manusia atau non-manusia (Sayes, 2014). Dalam konteks penelitian ini, ulama adalah aktor manusia, sementara media massa adalah aktor non-manusia yang memiliki *agency* dalam membentuk dinamika politik, dan keduanya membentuk jaringan yang tidak hierarkis, melainkan relasional dan dinamis. Menurut Callon (Callon, 1984), terdapat empat tahapan dalam melihat pembentukan jaringan aktor dalam ANT: (1) *Problematikasi*, di mana satu aktor atau lebih merumuskan masalah dan mengidentifikasi aktor-aktor lain yang relevan; (2) *Penarikan Minat (Interessement)*, di mana aktor-aktor yang teridentifikasi diberikan peran dan dimobilisasi untuk terlibat dalam jaringan; (3) *Pendaftaran (Enrolment)*, yang menandai keberhasilan menarik para aktor untuk terlibat dan menerima peran yang ditawarkan; (4) *Mobilisasi (Mobilization)*, ketika jaringan aktor terbentuk dengan aliansi yang lebih kuat dan stabil serta mulai menghasilkan dampak nyata. Melalui kerangka teori ini, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana jaringan aktor yang melibatkan ulama dan media massa terbentuk, beroperasi, dan memberikan dampak terhadap dinamika politik Indonesia pada berbagai periode sejarah dari tahun 1901 hingga 1998.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan literatur artikel ilmiah sebagai sumber utama data, dipadukan dengan metode historis yang terdiri dari heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi, untuk menelaah dinamika relasi ulama dan media massa pada periode pra kemerdekaan, Orde Lama, dan Orde Baru (Creswell, 2017; Lune & Berg, 2017). Analisis dilakukan secara induktif dengan menelusuri pola dan tema yang muncul dari artikel-artikel relevan (Safarudin et al., 2023). Metode historis digunakan untuk menelaah dinamika lintas periode melalui tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi (Kuntowijoyo, 2005). Pada tahap heuristik, pengumpulan data dilakukan melalui basis data (Google Scholar, Scopus, atau Garuda, sesuaikan dengan yang digunakan) dengan kata kunci "ulama", "media massa", "politik Indonesia", dan "dinamika pers Indonesia". Artikel yang terkumpul kemudian disaring menggunakan kriteria inklusi, yaitu artikel atau buku yang melalui proses akademik atau peer review, berbahasa Indonesia atau Inggris, serta membahas relasi ulama, media, dan politik secara mendalam pada periode yang dikaji. Artikel yang hanya membahas topik tersebut secara sepintas, yang isinya tumpang tindih dengan sumber lain, atau yang berada di luar periode yang dikaji, tidak dimasukkan ke dalam analisis. Melalui proses ini, terkumpul 53 artikel dan buku sebagai data utama penelitian, di luar literatur metode dan teori yang digunakan sebagai dasar kerangka analisis (Gorman dan Clayton, 2004). Kritik sumber dilakukan dengan menilai kredibilitas, relevansi, dan konsistensi metode dari setiap sumber, sementara interpretasi dan historiografi dilakukan untuk menemukan pola relasi dan menyusunnya menjadi satu narasi yang utuh dari masa ke masa (Gorman & Clayton, 2004).

Data dari 53 sumber tersebut kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman (Miles et al., 2014) yang dipadukan dengan kerangka Actor Network Theory atau ANT. Perlu ditegaskan bahwa karena penelitian ini menggunakan literatur sebagai sumber data, maka ANT digunakan untuk menelusuri bagaimana jaringan aktor digambarkan dalam literatur akademik, bukan untuk mengamati jaringan aktor secara langsung di lapangan. Proses analisis

dilakukan melalui tiga langkah. *Pertama*, kondensasi data, yaitu memilih informasi yang relevan dengan pembentukan jaringan aktor dari seluruh sumber yang ada. *Kedua*, penyajian data dalam bentuk matriks yang menggambarkan empat tahap dalam ANT, yaitu problematisasi, intereselement, enrolment, dan mobilisasi, pada setiap periode. *Ketiga*, penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk menemukan pola jaringan serta memahami dampaknya terhadap dinamika politik. Untuk menjaga validitas penelitian, dilakukan triangulasi sumber, yaitu membandingkan penjelasan dari berbagai artikel dengan sudut pandang dan konteks periode yang berbeda, sehingga pola yang ditemukan tidak hanya bersandar pada satu sumber saja.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Eksistensi Ulama dan Media Massa sebagai Aktor Politik di Indonesia**

##### **Eksistensi Ulama sebagai Aktor Politik**

Ulama merupakan bentuk jamak dari kata '*alim*' dalam bahasa Arab yang berarti para cendekiawan atau ilmuwan. Dalam bahasa Indonesia, ulama merujuk pada seseorang yang memiliki keahlian dalam ilmu agama Islam untuk disebarkan kepada masyarakat. Sebutan ulama sering diidentikkan dengan kyai, terutama dalam tradisi Jawa. Menurut Hamdan, dalam tradisi Jawa khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah, sebutan kyai diberikan kepada seseorang yang mempunyai keahlian dalam ilmu agama Islam untuk disampaikan kepada masyarakat (Hamdan, 2019). Selain itu, sebutan kyai juga sering disematkan pada barang-barang mistis yang dianggap mempunyai kekuatan gaib, serta diberikan kepada orang tua pada umumnya (Hasyim, 2023). Senada dengan hal tersebut, Abdurrahman memberi pengertian bahwa kyai merupakan sebutan yang diberikan oleh masyarakat bagi seseorang yang mempunyai kelebihan dalam pengetahuan agama Islam dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya (Abdurrahman, 2009).

Dalam konteks Indonesia, ulama memiliki peran strategis tidak hanya dalam ranah keagamaan, tetapi juga dalam ranah sosial dan

politik sebagai aktor yang memiliki otoritas dan kemampuan mobilisasi massa. Selain sebagai orang yang mempunyai kemampuan lebih dalam ilmu agama, dalam konteks politik kebangsaan ulama dianggap sebagai fondasi intelektual yang selalu eksis sebagai kunci gerakan sosial-keagamaan dalam menjaga stabilitas politik negara (Araniri et al., 2023). Dengan modal sosial yang dimiliki serta modal kultural yang melekat pada diri ulama menjadi potensi sebagai penggerak dalam menciptakan agenda publik. Hal ini bisa dilihat dari peran Ayatullah Khomeini pada revolusi di Iran tahun 1979 (Sujati, 2019). Melalui ceramah-ceramah politiknya baik dilakukan di mimbar maupun kaset mampu mempengaruhi dan menggerakkan rakyat dari semua kalangan untuk memprotes kebijakan Shah Reza Pahlevi. Hal inilah yang menjadi embrio terjadinya revolusi Iran yang mengantarkan dia dianggap sebagai *creator* dari meletusnya gerakan revolusi Islam tersebut (Kusuma, 2020).

Secara historis, ulama telah menjadi aktor penting dalam dinamika politik Indonesia sejak masa pra-kemerdekaan. Pada masa itu eksistensi ulama merupakan elit agama yang sekaligus menjadi elit pemerintahan di kerajaan Islam (Baihaqi, 2019). Setelah runtuhnya kerajaan Islam akibat kehadiran VOC, banyak ulama yang merupakan pensiunan elit pemerintahan pada saat itu mendirikan lembaga sosial-keagamaan yang berfungsi sebagai lembaga pendidikan Islam di desa-desa. Keberadaan lembaga pendidikan Islam ini berubah menjadi media perjuangan yang menjadi embrio lahirnya organisasi-organisasi lainnya yang menyuarakan kemerdekaan (Armansyah, 2017). Di antaranya pada saat itu adalah Parsaryikatan Ulama yang didirikan oleh H. Abdul Halim pada tahun 1911, Sarikat Islam yang didirikan oleh H. Samanhudi pada tahun 1911, Muhammadiyah yang didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan pada tahun 1918, Perserikatan Islam yang didirikan oleh Hamzah dan Muhammad Yunus pada tahun 1922, dan Nahdlatul Ulama (NU) yang didirikan oleh K.H. Hasyim As'ari dan K.H. Wahab Hasbullah pada tahun 1926. Lahirnya lembaga sosial keagamaan ini dipengaruhi oleh penindasan yang dilakukan oleh penjajah. Kemudian lembaga sosial keagamaan ini berkembang menjadi motor dalam gerakan sosial keagamaan. Adapun bentuk penindasan yang paling terasa dialami oleh kaum muslim pada saat itu

adalah sulitnya mencari kesempatan dalam memperbaiki kondisi ekonomi, minimnya ruang ekspresi dan keleluasaan dalam pengembangan pendidikan Islam hingga terbatasnya penyaluran aspirasi di panggung politik (Ramadhani et al., 2024).

Pada fase berikutnya setelah kemerdekaan, eksistensi ulama mengalami perubahan yang signifikan. Pada awal terbentuknya negara terjadi perdebatan yang mendasar tentang bentuk negara dan sistem politik yang akan dibangun. Perdebatan ini melibatkan ulama dalam kapasitas mereka sebagai pemimpin politik dan spiritual umat Islam. Effendi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama mengenai bentuk negara ideal, antara yang menginginkan negara Islam dan yang menerima Pancasila sebagai dasar negara (Effendi, 2003). Meskipun demikian, ulama tetap menjadi aktor politik yang signifikan, baik melalui partai politik Islam maupun organisasi massa. Pada masa Orde Lama, ulama terlibat aktif dalam perdebatan mengenai ideologi negara, khususnya dalam sidang-sidang konstituante (Jainuddin, 2019). Ulama melalui partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU memiliki pengaruh yang cukup besar dalam politik nasional.

Namun pada masa Orde Baru, peran politik ulama mengalami pembatasan yang signifikan. Rezim Soeharto yang otoriter berupaya mendepolitisasi Islam dan membatasi peran ulama dalam politik praktis (Aspinall et al., 2010; Padmo, 2012, pp. 1–5). Meskipun demikian, ulama tetap eksis melalui jalur dakwah, pendidikan, dan organisasi sosial keagamaan. Barton et al. menjelaskan bahwa ulama pada masa Orde Baru mengadopsi strategi adaptif, fokus pada pembangunan basis sosial-keagamaan sambil menunggu momentum untuk kembali terlibat dalam politik praktis (Barton et al., 2021a). Indrawati menegaskan bahwa transformasi peran ulama dari Orde Baru ke Orde Reformasi menunjukkan dinamika yang signifikan, di mana ulama kembali memiliki ruang yang lebih luas dalam politik praktis (Indrawati, 2018). Pada akhir Orde Baru, ulama kembali memainkan peran penting dalam mendorong reformasi dan demokratisasi melalui organisasi seperti ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) (Imron, 2022; Wahid et al., 2025).

### ***Eksistensi Media Massa sebagai Aktor Politik***

Media massa di Indonesia memiliki sejarah panjang sebagai aktor politik yang tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik bangsa. Dalam perspektif ANT, media massa bukan sekadar alat atau instrumen pasif, melainkan aktor non-manusia yang memiliki *agency* dalam membentuk realitas politik. Sejak masa kolonial, media massa telah menjadi instrumen penting dalam membentuk opini publik dan memobilisasi massa. Anom menjelaskan bahwa pers Indonesia pertama kali muncul pada abad ke-19 dengan diterbitkannya surat kabar berbahasa Belanda yang sebagian besar dimiliki oleh pemerintah kolonial atau pengusaha Eropa (Anom, 2013, p. 74). Namun, seiring dengan munculnya kesadaran nasional, mulai bermunculan media massa yang dimiliki dan dikelola oleh pribumi (Arnus, 2015).

Pada masa pergerakan nasional, media massa menjadi salah satu aktor utama untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme dan anti-kolonialisme. Cahyani menjelaskan bahwa surat kabar seperti Medan Prijaji, Bintang Hindia, dan berbagai publikasi yang diterbitkan oleh organisasi pergerakan menjadi wadah penting untuk mengkampanyekan kemerdekaan (Cahyani, 2023). Media massa pada periode ini berfungsi tidak hanya sebagai penyebar informasi, tetapi juga sebagai aktor yang membentuk kesadaran politik dan memobilisasi massa. Menariknya, banyak media massa pada masa ini yang dimiliki atau memiliki afiliasi dengan organisasi Islam, menunjukkan adanya jaringan yang terbentuk antara ulama dan media massa. Efendi menjelaskan bahwa Sarekat Islam, misalnya, memiliki beberapa surat kabar seperti Sinar Djawa dan Panjaran Warta yang menjadi corong penyebaran ide-ide organisasi (Efendi, 2020, pp. 21–23). Demikian pula dengan NU dan Muhammadiyah yang memiliki media cetak sendiri untuk menyebarkan ajaran dan pandangan politik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa media massa bukan hanya alat di tangan ulama, tetapi juga aktor yang membentuk bagaimana pesan-pesan ulama dikonstruksi dan disebarkan. Rosyid dalam kajiannya tentang sejarah pers Islam menegaskan bahwa media Islam telah menjadi bagian integral dari gerakan sosial-politik umat Islam Indonesia sejak masa colonial (Rosyid, 2015, pp. 1–5).

Pasca-kemerdekaan, media massa mengalami perkembangan pesat sebagai aktor politik meskipun menghadapi berbagai tantangan.

Pada masa Orde Lama, media massa relatif bebas meskipun harus berhadapan dengan kontrol pemerintah dalam beberapa hal (Widiyanta & Miftahuddin, 2024). Berbagai partai politik dan organisasi massa memiliki media cetak sendiri yang menjadi alat untuk memperjuangkan ideologi dan kepentingan mereka. Hutagalung menjelaskan bahwa kebebasan pers pada masa ini juga diwarnai oleh konflik politik yang tajam, termasuk peristiwa pembredelan terhadap media-media yang dianggap berbahaya bagi stabilitas politik (Hutagalung, 2013). Zulianto et al. dalam penelitiannya tentang perkembangan surat kabar Suara Merdeka menunjukkan dinamika pers pada periode Orde Lama hingga era reformasi (Zulianto et al., 2016).

Pada masa Orde Baru, media massa sebagai aktor politik mengalami kontrol yang sangat ketat dari pemerintah. Anom dan Waluyo menjelaskan bahwa rezim Soeharto menerapkan sistem perizinan yang ketat (SIUPP) dan melakukan pembredelan terhadap media-media yang dianggap kritis terhadap pemerintah (Anom & Waluyo, 2011). Hill mencatat bahwa meskipun demikian, media massa tetap eksis dan bahkan mengalami perkembangan dari segi teknologi dan jangkauan (Hill, 1994). Media-media Islam seperti Republika dan Sabili tetap dapat terbit meskipun harus berhati-hati dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah (Ashaf, 2006; Triwardani, 2013). Imron menjelaskan bahwa pembredelan pers pada masa Orde Baru menjadi salah satu bentuk kontrol politik yang ketat terhadap ruang public (Imron, 2020). Namun pada akhir Orde Baru, media massa menjadi salah satu aktor penting yang mendorong reformasi dan demokratisasi (D. N. Hidayat, 2000).

### **Pembentukan Jaringan Aktor: Ulama dan Media Massa dalam Perspektif ANT**

#### ***Tahap Problematisasi***

Dalam konteks Actor-Network Theory, tahap problematisasi merupakan tahap awal pembentukan jaringan di mana aktor-aktor utama mengidentifikasi masalah dan merumuskan bagaimana masalah tersebut dapat diselesaikan dengan melibatkan aktor-aktor lain. Tahap ini menentukan siapa yang menjadi aktor *obligatory passage point*

(OPP) yang harus dilalui oleh aktor-aktor lain untuk mencapai tujuan mereka (Callon, 1984, pp. 198–200). Dalam dinamika politik Indonesia, ulama dan media massa sama-sama mengidentifikasi berbagai permasalahan politik yang dihadapi bangsa pada setiap periode sejarah dan memosisikan diri mereka sebagai bagian dari solusi.

Pada masa pra-kemerdekaan, problematisasi yang dirumuskan adalah bagaimana melawan kolonialisme dan membangun kesadaran nasional di tengah dominasi penjajah (Latief, 2003, pp. 66–70; Nasri'ah, 2024). Ulama mengidentifikasi bahwa penjajahan tidak hanya merupakan penindasan politik dan ekonomi, tetapi juga ancaman terhadap agama dan budaya. Media massa mengidentifikasi bahwa perjuangan melawan kolonialisme membutuhkan penyebaran ide-ide kemerdekaan secara masif kepada masyarakat (Anom, 2013, pp. 73–75). Kedua aktor ini kemudian merumuskan bahwa pembentukan jaringan antara ulama dan media massa diperlukan untuk mencapai tujuan kemerdekaan, di mana ulama menjadi sumber legitimasi dan konten, sementara media massa menjadi kanal penyebaran (Widiyanta & Miftahuddin, 2024). Padmo menjelaskan bahwa gerakan pembaharuan Islam di Indonesia pada masa ini tidak terlepas dari peran media sebagai alat penyebaran ide-ide pembaharuan (Padmo, 2012, pp. 154–155).

Pada masa Orde Lama, problematisasi yang muncul adalah bagaimana membangun negara yang sesuai dengan aspirasi rakyat Indonesia yang beragam dan bagaimana menempatkan nilai-nilai Islam dalam sistem politik nasional (Hidayatulloh & Saumantri, 2023). Ulama mengidentifikasi perlunya nilai-nilai Islam dalam konstitusi dan sistem hukum negara (Effendy, n.d., pp. 69–70), sementara media massa mengidentifikasi perlunya ruang publik yang demokratis untuk berdebat mengenai bentuk dan ideologi negara (Hutagalung, 2013, pp. 54–55). Jaringan antara ulama dan media massa pada periode ini berfungsi untuk memperjuangkan kepentingan politik Islam dalam konteks pembentukan negara. Mahanani et al. memberikan gambaran komprehensif tentang Islam dan politik di Indonesia dari perspektif sejarah, menunjukkan kompleksitas perdebatan antara berbagai

kelompok pada masa Orde Lama (Qisthi Faradina Ilma Mahanani et al., 2022).

Pada masa Orde Baru, problematisasi bergeser pada bagaimana bertahan dan tetap relevan di tengah rezim otoriter yang membatasi ruang gerak politik (Aspinall et al., 2010). Ulama dan media massa sama-sama mengidentifikasi bahwa untuk tetap eksis, mereka harus menemukan strategi adaptasi yang memungkinkan mereka beroperasi dalam batas-batas yang ditentukan rezim tanpa kehilangan pengaruh politik mereka (Barton et al., 2021a; Imron, 2022). Jaringan yang terbentuk pada periode ini lebih bersifat defensif dan adaptif, fokus pada pembangunan basis sosial-keagamaan sebagai modal untuk kembali terlibat dalam politik ketika kondisi politik memungkinkan.

### ***Tahap Interestement***

Tahap *interestement* adalah tahap di mana aktor-aktor yang telah diidentifikasi dalam tahap problematisasi dimobilisasi dan diberikan peran dalam menyelesaikan masalah. Dalam tahap ini, aktor-aktor utama berusaha untuk menarik dan mengunci aktor-aktor lain agar bergabung dalam jaringan dengan menawarkan peran dan identitas tertentu (Callon, 1984, pp. 197–198). Dalam konteks pembentukan jaringan antara ulama dan media massa, tahap ini dapat dilihat dari bagaimana kedua aktor saling membutuhkan dan memberikan peran strategis satu sama lain dalam mencapai tujuan politik mereka.

Ulama memberikan peran kepada media massa sebagai corong untuk menyebarkan ide-ide keagamaan dan politik mereka kepada masyarakat luas. Media massa memberikan legitimasi dan jangkauan yang lebih luas bagi dakwah dan gerakan politik ulama. Tanpa media massa, ide-ide ulama akan terbatas pada jamaah yang hadir dalam pengajian atau ceramah (Setiawan et al., 2022). Sebaliknya, media massa memberikan peran kepada ulama sebagai sumber otoritas moral dan spiritual yang dapat memperkuat kredibilitas berita dan opini yang disebarkan. Ulama memberikan konten substansial dan basis massa yang loyal kepada media massa. Tanpa ulama, media massa akan kehilangan konten yang memiliki daya tarik emosional dan spiritual bagi pembaca Muslim (Rosyid, 2015, pp. 9–10).

Pada masa pra-kemerdekaan, *interesement* ini terlihat jelas dalam pendirian media-media Islam oleh organisasi yang dipimpin ulama. Sarekat Islam mendirikan Sinar Djawa, NU mendirikan Swara NU, dan Muhammadiyah mendirikan Suara Muhammadiyah (Efendi, 2020, pp. 34–35). Pendirian media-media ini bukan sekadar aksi instrumental, tetapi merupakan proses pembentukan jaringan di mana ulama dan media massa saling mengunci dalam relasi yang *mutually constitutive*. Media-media ini menjadi alat efektif untuk menyebarkan ide-ide nasionalisme yang dibalut dengan nilai-nilai keagamaan (Cahyani, 2023, pp. 28–29). Ulama menulis artikel dan ceramah yang kemudian disebarakan melalui media massa, sementara media massa mendapatkan konten berkualitas dan pembaca setia dari jamaah ulama.

Pada masa Orde Lama, *interesement* terjadi dalam konteks perdebatan ideologi negara. Media massa memberikan ruang bagi ulama untuk menyuarakan pandangan mereka mengenai bentuk negara Islam atau negara Pancasila (Jainuddin, 2019, p. 229). Ulama memanfaatkan media massa untuk memobilisasi massa dalam mendukung pandangan politik mereka. Jaringan ini diperkuat melalui afiliasi partai politik dengan media massa tertentu, di mana partai-partai Islam memiliki media cetak sendiri yang menjadi corong propaganda politik mereka (Qisthi Faradina Ilma Mahanani et al., 2022, p. 65). Pada masa Orde Baru, meskipun menghadapi pembatasan, ulama dan media massa tetap menjalin kerja sama, misalnya melalui kolom-kolom keagamaan di media umum atau melalui media khusus Islam yang tetap eksis dengan strategi adaptif, seperti fokus pada isu-isu sosial-keagamaan yang tidak langsung menentang pemerintah (Ashaf, 2006, pp. 8–9).

### ***Tahap Enrolment***

Tahap *enrolment* menandai keberhasilan dalam menarik aktor-aktor untuk terlibat dalam penyelesaian masalah dan menerima peran yang ditawarkan dalam jaringan. Dalam tahap ini, negosiasi dan kompromi terjadi untuk menstabilkan jaringan (Callon, 1984, p. 199). Dalam konteks pembentukan jaringan antara ulama dan media massa, tahap ini dapat dilihat dari terbentuknya kerja sama konkret dan institusional antara keduanya yang menandakan bahwa kedua aktor

telah menerima peran mereka dalam jaringan dan berkomitmen untuk bekerja sama.

*Enrolment* yang paling jelas terlihat adalah dalam pendirian dan pengelolaan media massa oleh organisasi Islam. Pada masa pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan, hampir semua organisasi Islam besar memiliki media cetak sendiri (Efendi, 2020, p. 30). Ini menunjukkan bahwa ulama telah berhasil "mendaftarkan" media massa sebagai bagian integral dari strategi politik dan dakwah mereka. Demikian pula, media massa telah berhasil "mendaftarkan" ulama sebagai kontributor tetap yang memberikan konten dan kredibilitas. *Enrolment* ini bersifat dua arah dan saling menguntungkan, menciptakan jaringan yang stabil dan produktif (Rosyid, 2015, pp. 8–10).

*Enrolment* juga terlihat dalam munculnya figur-figur ulama yang juga berprofesi sebagai jurnalis atau pimpinan media massa, serta figur-figur jurnalis yang memiliki pengetahuan mendalam tentang Islam (Rasyid, 2019). Tokoh seperti H.O.S. Tjokroaminoto yang memimpin Sarekat Islam sekaligus aktif dalam penerbitan media, atau K.H. Mas Mansur dari Muhammadiyah yang juga terlibat dalam dunia pers, menunjukkan adanya integrasi peran antara ulama dan media massa (Padmo, 2012, pp. 157–158). Figur-figur *hybrid* ini menjadi penghubung kuat dalam jaringan, memastikan bahwa komunikasi dan koordinasi antara ulama dan media massa berjalan lancar.

Pada masa Orde Baru, *enrolment* ini berlanjut meskipun dalam bentuk yang lebih terbatas dan adaptif. Ulama tetap terlibat dalam media massa, misalnya melalui keterlibatan dalam media-media yang disponsori pemerintah atau melalui program-program televisi keagamaan (Indrawati, 2018, pp. 21–22). Meskipun ruang politik langsung terbatas, jaringan antara ulama dan media massa tetap eksis dan bahkan berkembang dalam domain sosial-keagamaan. *Enrolment* pada periode ini menunjukkan fleksibilitas dan resiliensi jaringan dalam menghadapi tekanan eksternal (Imron, 2022, pp. 44–50).

Namun, proses *enrolment* pada masa Orde Lama tidak selalu berjalan lancar. Persaingan antar kelompok ulama untuk menjadi representasi utama Islam politik justru memicu perpecahan. Konflik ini muncul pada tahun 1952 ketika jabatan Menteri Agama dalam

Kabinet Wilopo diberikan kepada Fakih Usman dari Muhammadiyah, sementara NU menginginkan Wahid Hasyim menempati posisi tersebut. Akibatnya, NU memutuskan keluar dari Masyumi melalui Mukhtar ke-19 di Palembang pada tahun 1952 (Anwar, 2020). Peristiwa ini menunjukkan bahwa proses *enrolment* tidak menghasilkan satu jaringan ulama yang bersatu, tetapi melahirkan dua jaringan yang berbeda. NU mewakili kelompok tradisional, sedangkan Masyumi bersama Muhammadiyah mewakili kelompok modernis. Kedua kelompok kemudian membangun dan memanfaatkan media cetak masing-masing sebagai sarana penyebaran gagasan politik. Dengan demikian, kegagalan membangun satu jaringan bersama justru melahirkan jaringan lain yang sama-sama melibatkan ulama dan media, tetapi memiliki kepentingan yang berbeda.

### ***Tahap Mobilization***

Tahap mobilisasi adalah tahap di mana jaringan aktor yang telah terbentuk mulai bekerja secara efektif dan menghasilkan dampak nyata. Dalam tahap ini, jaringan tidak hanya stabil tetapi juga produktif, mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam tahap problematisasi (Callon, 1984, pp. 197–200). Dalam konteks jaringan antara ulama dan media massa, mobilisasi dapat dilihat dari kemampuan keduanya dalam mempengaruhi opini publik dan menggerakkan massa untuk tujuan politik tertentu.

Pada masa pra-kemerdekaan, mobilisasi terlihat jelas dalam gerakan-gerakan anti-kolonial yang dimotori oleh ulama dan disebarluaskan melalui media massa. Resolusi Jihad yang dikeluarkan oleh NU pada tahun 1945, misalnya, disebarluaskan secara masif melalui berbagai media massa dan berhasil memobilisasi ribuan santri dan umat Islam untuk berperang melawan Belanda (Ahmad, 2022). Media massa berperan penting dalam menerjemahkan fatwa keagamaan menjadi aksi politik massal. Jaringan antara ulama dan media massa pada periode ini menghasilkan dampak politik yang sangat signifikan, yaitu mobilisasi massa untuk pertahanan kemerdekaan (Djaelani, 1994, p. 167).

Kampanye-kampanye nasionalisme yang dilakukan melalui media massa Islam juga berhasil membangun kesadaran politik di

kalangan umat Islam (Yatmin et al., 2023). Artikel-artikel, editorial, dan opini yang ditulis oleh ulama atau dipengaruhi oleh pandangan ulama disebarkan melalui media massa dan membentuk diskursus politik nasional. Jaringan ini tidak hanya memobilisasi massa secara fisik (misalnya untuk berperang), tetapi juga memobilisasi kesadaran dan identitas politik (Cahyani, 2023, pp. 32–34).

Pada masa Orde Lama, mobilisasi terjadi dalam konteks pemilihan umum dan perdebatan ideologi. Ulama melalui partai-partai Islam seperti Masyumi dan NU berhasil memobilisasi massa pemilih melalui kampanye yang disebarkan media massa (Jainuddin, 2019, pp. 230–240). Media-media Islam menjadi alat efektif untuk mengkampanyekan kandidat dan program politik yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jaringan antara ulama dan media massa pada periode ini menghasilkan mobilisasi elektoral yang signifikan, dengan partai-partai Islam meraih suara yang cukup besar dalam pemilu 1955 (Qisthi Faradina Ilma Mahanani et al., 2022).

Mobilisasi jaringan ulama dan media pada masa Orde Lama tidak hanya bertujuan memperkuat dukungan umat Islam, tetapi juga digunakan untuk menghadapi aktor politik lain, terutama PKI. Harian *Abadi*, media resmi Masyumi sejak 1947, dimanfaatkan untuk menyebarkan gagasan politik Islam sekaligus mengkritik PKI (Barton et al., 2021b). Pola serupa terlihat pada Majalah *Hikmah* yang secara terbuka memuat rubrik untuk menyerang komunisme dan PKI (Aritonang, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa jaringan ulama dan media pada periode ini tidak hanya membangun solidaritas internal, tetapi juga terlibat dalam persaingan politik yang tajam. Namun, ketika kekuasaan Soekarno semakin kuat pada masa Demokrasi Terpimpin, media-media yang kritis terhadap pemerintah, termasuk *Abadi*, justru menghadapi tekanan dan pembredelan. Dengan demikian, keberhasilan mobilisasi politik tidak selalu menjamin keberlangsungan jaringan yang dibangun.

Pada masa Orde Baru, meskipun mobilisasi politik dibatasi, ulama dan media massa tetap berhasil memobilisasi massa dalam isu-isu tertentu. Dukungan terhadap ICMI, kritik terhadap kebijakan-kebijakan yang dianggap anti-Islam, dan mobilisasi opini publik mengenai isu-isu sosial-keagamaan menunjukkan bahwa jaringan

antara ulama dan media massa tetap produktif meskipun beroperasi dalam ruang yang terbatas (Imron, 2022; Wahid et al., 2025, pp. 45–50). Jaringan ini beradaptasi dengan konteks politik yang represif dengan mengalihkan fokus mobilisasi dari politik langsung ke isu-isu sosial dan budaya.

Ketegangan tersebut berlanjut pada masa Orde Baru. Setelah sempat dibredel pada masa Orde Lama, Harian *Abadi* kembali terbit, tetapi kemudian kembali ditutup oleh pemerintah Orde Baru. Peristiwa ini menunjukkan bahwa ketahanan jaringan ulama dan media memiliki batas ketika negara menganggapnya sebagai ancaman politik. Penutupan media tidak hanya menghentikan aktivitas sebuah penerbitan, tetapi juga memutus saluran komunikasi yang selama bertahun-tahun digunakan ulama untuk menjangkau masyarakat. Karena itu, perkembangan jaringan ulama dan media sepanjang periode 1901–1998 tidak berlangsung secara terus-menerus dan semakin kuat, melainkan mengalami pasang surut, gangguan, dan penyesuaian sesuai perubahan situasi politik.

Mobilisasi politik yang mencapai puncaknya pada penghujung Orde Baru perlu dipahami sebagai kulminasi dari dinamika historis panjang sebagaimana dirangkum dalam Tabel 1, di mana relasi antara ulama, media, dan negara mengalami transformasi lintas periode. Sejak pra-kemerdekaan, represi kolonial terhadap aktivitas keagamaan dan pers mendorong ulama membangun basis sosial alternatif, yang kemudian berlanjut pada fase Orde Lama melalui kontestasi ideologis terkait posisi Islam dalam negara, meskipun tetap berada dalam bayang-bayang kontrol negara terhadap media dan politik. Pada era Orde Baru, konsolidasi kekuasaan otoriter melalui depolitisasi Islam dan kontrol media justru mengakumulasi ketegangan struktural yang pada akhirnya membuka ruang bagi mobilisasi besar. Dalam konteks ini, dukungan tokoh seperti Abdurrahman Wahid dan Amien Rais yang dimediasi oleh media menjadi faktor penting dalam mempercepat delegitimasi rezim Suharto (D. N. Hidayat, 2000), sehingga menegaskan bahwa mobilisasi tersebut merupakan hasil akumulasi historis dari relasi kuasa yang bersifat dinamis dan berlapis.

Tabel 1.  
 Dinamika Politik dan Permasalahan di Indonesia

Periode	Dinamika Politik	Permasalahan Utama
<b>Pra-Kemerdekaan (Kolonial, abad ke-18–1942)</b>	Dominasi kolonial mendorong ulama beralih ke basis pedesaan melalui pesantren. Politik Etis membuka ruang bagi lahirnya organisasi Islam (Sarekat Islam, Muhammadiyah, NU).	Represi kolonial terhadap aktivitas keagamaan, pembatasan organisasi Islam dan pers, serta marginalisasi ulama dalam struktur kekuasaan.
<b>Orde Lama (1945–1966)</b>	Kontestasi ideologis terkait dasar negara (Islam vs. Pancasila) dan penerapan Nasakom dalam Demokrasi Terpimpin.	Pembatasan partai Islam, kontrol negara terhadap media, serta meningkatnya polarisasi ideologi politik.
<b>Orde Baru (1966–1998)</b>	Konsolidasi kekuasaan otoriter dengan stabilitas politik sebagai prioritas, disertai peristiwa krisis seperti Malari dan Tanjung Priok.	Represi terhadap aktivitas politik dan keagamaan, kontrol ketat media, serta pembatasan peran ulama dalam ruang publik.

**Sumber:** Diolah dari literatur sejarah politik Indonesia (kolonial hingga Orde Baru) dan studi tentang relasi agama, negara, dan media.

### **Pola Relasi Jaringan dan Dampaknya terhadap Dinamika Politik**

Dari analisis menggunakan kerangka ANT, dapat diidentifikasi beberapa pola relasi dalam pembentukan jaringan antara ulama dan media massa dalam dinamika politik Indonesia. *Pertama*, pola relasi simbiotik mutualistik, di mana ulama dan media massa saling membutuhkan dan saling memperkuat dalam jaringan (Siti Marwiyah, 2022; Yudi Rusfiana & Ismail Nurdin, 2017). Ulama membutuhkan media massa sebagai alat untuk menyebarkan ide dan memobilisasi massa, sementara media massa membutuhkan ulama sebagai sumber otoritas, konten, dan basis pembaca. Pola ini paling kuat terlihat pada masa pra-kemerdekaan dan awal kemerdekaan, di mana pendirian media massa oleh organisasi Islam menjadi strategi utama dalam perjuangan politik. Namun, seperti terlihat dalam perpecahan NU dan Masyumi serta pembredelan Harian *Abadi*, hubungan saling menguntungkan antara ulama dan media tidak selalu stabil. Jaringan yang semula bersatu dapat terpecah menjadi kelompok-kelompok

yang saling bersaing, sementara hubungan antara ulama dan media juga dapat terputus akibat campur tangan negara sebagai aktor penting dalam jaringan politik yang lebih luas.

*Kedua*, Relasi antara ulama dan media pada dasarnya bersifat relasional, tetapi tidak selalu setara secara struktural. Media memang memiliki agency dalam menentukan pemberitaan, framing, dan pemilihan isu sehingga tidak sepenuhnya berada di bawah kendali ulama. Namun, fakta historis menunjukkan bahwa banyak media Islam justru berada dalam posisi subordinat terhadap organisasi ulama yang mendirikannya. Misalnya, *Suara Muhammadiyah* didirikan sebagai media dakwah Muhammadiyah dan berada di bawah otoritas organisasi. Demikian pula *Harian Abadi* dan *Majalah Hikmah* yang berfungsi sebagai media resmi Partai Masyumi, sehingga perannya lebih sebagai corong organisasi daripada institusi yang independen.

Oleh karena itu, konsep relasi non-hierarkis perlu dipahami secara kontekstual. Pada level wacana, media memiliki peran aktif dalam membentuk makna dan penerimaan pesan ulama melalui proses redaksional. Namun, pada level kelembagaan, hubungan ulama dan media dalam banyak kasus justru bersifat hierarkis karena media didirikan, dimiliki, dan dikendalikan oleh organisasi ulama. Dengan demikian, hubungan ulama dan media tidak sepenuhnya bebas dari hierarki, melainkan merupakan kombinasi antara agency media dalam produksi wacana dan kontrol institusional yang dimiliki oleh organisasi keagamaan.

*Ketiga*, pola relasi yang dipengaruhi oleh konteks sistem politik (Martini, 2014, pp. 1–5). Pada rezim yang demokratis atau semi-demokratis seperti Orde Lama, jaringan antara ulama dan media massa relatif bebas dan dinamis (Jainuddin, 2019, pp. 225–230). Keduanya dapat berinteraksi secara terbuka dalam ruang publik politik, dan jaringan yang terbentuk lebih berorientasi pada mobilisasi politik langsung. Namun, keterbukaan ini juga memungkinkan jaringan ulama–media menjadi arena pertarungan ideologis yang tajam antar sesama kelompok Islam (NU versus Masyumi) maupun antara kelompok Islam dan kelompok non-Islam (Masyumi versus PKI), sehingga dinamisme pada periode ini sebagian berwujud konflik, bukan hanya kolaborasi. Sebaliknya, pada rezim otoriter seperti Orde

Baru, jaringan keduanya dibatasi oleh kontrol negara, meskipun tidak sepenuhnya dapat dihilangkan (Fealy et al., 2008; Triwardani, 2013). Ulama dan media massa harus mencari strategi adaptasi untuk tetap eksis dan relevan, dan jaringan yang terbentuk lebih bersifat defensif dan fokus pada isu-isu sosial-keagamaan yang tidak langsung mengancam rezim (Barton et al., 2021a; Imron, 2022).

*Keempat*, pola relasi yang bersifat transformatif dan adaptif. Relasi antara ulama dan media massa tidak statis, tetapi terus berubah dan beradaptasi sesuai dengan konteks politik yang berkembang. Pada masa pra-kemerdekaan, jaringan ini bersifat revolusioner dan anti-*establishment*, fokus pada perlawanan terhadap kolonialisme (Latief, 2003). Pada masa Orde Lama, jaringan ini bersifat ideologis dan kompetitif, terlibat dalam perdebatan mengenai bentuk negara dan sistem politik (Effendi, 2003, pp. 90–94). Sifat kompetitif ini tidak hanya terlihat dalam hubungan antara kelompok Islam dan non-Islam, tetapi juga terjadi di antara sesama jaringan ulama–media. Kondisi tersebut tampak pada rivalitas antara NU dan Masyumi yang berlangsung di dalam payung politik Islam itu sendiri. Pada masa Orde Baru, jaringan ini bersifat adaptif dan strategis, mencari ruang-ruang yang memungkinkan untuk tetap eksis tanpa berhadapan langsung dengan rezim (Padmo, 2012, pp. 150–152). Kemampuan jaringan untuk bertransformasi ini menunjukkan resiliensi dan fleksibilitas yang tinggi. Meskipun resiliensi tersebut juga harus dipahami sebagai respons terhadap pengalaman traumatik pembubaran dan pembredelan yang dialami jaringan ulama–media pada periode-periode sebelumnya.

Dampak dari pembentukan jaringan aktor antara ulama dan media massa terhadap dinamika politik Indonesia sangat signifikan dan dapat diidentifikasi dalam beberapa dimensi. *Pertama*, jaringan ini telah berkontribusi pada pembentukan kesadaran politik dan identitas nasional Indonesia (Perdana & Pratama, 2022; Widiyanta & Miftahuddin, 2024). Media massa yang dikelola atau dipengaruhi ulama menjadi sarana penting untuk menyebarkan ide-ide kemerdekaan dan membangun identitas nasional yang dibalut dengan nilai-nilai Islam. Narasi-narasi tentang perjuangan melawan penjajah yang dikaitkan dengan jihad, misalnya, disebarkan melalui jaringan ini

dan membentuk kesadaran politik umat Islam Indonesia (Ahmad, 2022).

*Kedua*, jaringan ini mempengaruhi arah dan bentuk sistem politik Indonesia (Hidayatulloh & Saumantri, 2023). Perdebatan mengenai ideologi negara, konstitusi, dan sistem hukum yang melibatkan ulama dan disebarluaskan melalui media massa telah membentuk karakter politik Indonesia yang unik, yaitu negara yang bukan negara Islam tetapi juga bukan negara sekuler (Effendi, 2003, pp. 98–100; Qisthi Faradina Ilma Mahanani et al., 2022). Kompromi antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis yang menghasilkan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari peran jaringan ulama dan media massa dalam membentuk diskursus politik publik.

*Ketiga*, jaringan ini telah menciptakan pola partisipasi politik yang khas di Indonesia, di mana faktor agama dan kekuatan massa yang dimobilisasi melalui media menjadi variabel penting dalam politik (Lukmantoro, 2012; Rizha, 2018). Partai-partai politik Islam, organisasi massa berbasis Islam, dan media massa Islam membentuk ekosistem politik yang kompleks dan saling terkait. Mobilisasi massa untuk pemilu, demonstrasi, atau gerakan sosial seringkali melibatkan jaringan antara ulama dan media massa. *Keempat*, jaringan ini telah menunjukkan bahwa perubahan politik di Indonesia tidak dapat dipahami hanya dari perspektif aktor manusia (ulama atau politisi) atau institusi politik formal, tetapi juga harus mempertimbangkan peran aktor non-manusia seperti media massa sebagai bagian dari jaringan aktor yang saling terkait (Callon, 1984; Mustika, 2018). Pendekatan ANT membantu kita memahami bahwa kekuasaan politik tidak hanya berada di tangan individu atau institusi, tetapi tersebar dalam jaringan yang melibatkan berbagai aktor, baik manusia maupun non-manusia.

*Kelima*, jaringan ini menunjukkan bahwa, meskipun berada di bawah pembatasan rezim otoriter, konfigurasi aktor yang solid tetap mampu bertahan, beradaptasi, dan bahkan berfungsi sebagai kekuatan signifikan dalam mendorong perubahan politik (Dedy N. Hidayat, 2000; Imron, 2022)(D. N. Hidayat, 2000; Imron, 2022). Ketangguhan relasi antara ulama dan media massa sepanjang era Orde Baru serta kontribusinya dalam memfasilitasi momentum reformasi mengindikasikan bahwa jaringan yang telah terinstitusionalisasi

memiliki resiliensi yang tidak mudah dieliminasi oleh kekuasaan politik formal (Barton et al., 2021b; Aspinall et al., 2010). Lebih jauh, jaringan tersebut beroperasi melalui logika internal yang otonom, sehingga tidak sepenuhnya dapat dikontrol oleh satu aktor dominan, termasuk negara.

Pola pembentukannya tidak berlangsung secara seragam lintas periode, melainkan melalui empat tahap dalam kerangka Teori Aktor Jaringan atau ANT. Setiap tahap merefleksikan karakter dan dinamika spesifik yang berbeda, sesuai dengan konteks politik yang melingkupinya. Untuk memetakan secara sistematis proses pembentukan dan operasionalisasi jaringan ulama dan media massa pada setiap fase historis, tabel berikut menyajikan sintesis analitis berbasis kerangka Teori Aktor Jaringan.

Tabel 2.

Translasi Jaringan Ulama–Media dalam Dinamika Politik Indonesia  
 (Perspektif ANT)

Tahapan ANT	Pra-Kemerdekaan (Kolonial, abad ke-18– 1942)	Orde Lama (1945–1966)	Orde Baru (1966– 1998)
<b>Problematisasi</b>	Kolonialisme memposisikan ulama sebagai aktor marjinal; kebebasan religius-politik dibatasi. <i>Obligatory Passage Point (OPP)</i> : pembentukan basis alternatif (pesantren) sebagai ruang produksi otoritas. Media (awal pers) muncul sebagai kebutuhan kanal artikulasi perjuangan.	Negara pascakemerdekaan menjadi OPP baru melalui perdebatan dasar negara (Islam vs. Pancasila). Ulama dan media diposisikan dalam relasi dengan ideologi negara; kontrol negara atas media membatasi artikulasi.	Rezim otoriter menetapkan negara (melalui regulasi seperti SIUPP dan asas tunggal) sebagai OPP dominan. Ulama dan media dipaksa beroperasi dalam kerangka depolitisasi dan kontrol negara.
<b>Interessement</b>	Ulama menstabilkan jaringan melalui pesantren dan jaringan intelektual transnasional. Media mulai mengunci peran	Partai politik Islam menjadi perangkat interessement untuk mengikat ulama dalam struktur negara. Media menyediakan ruang	Strategi adaptasi menjadi kunci: ulama mengalihkan fokus ke dakwah dan pendidikan; media menegosiasikan batas

	<b>Pra-Kemerdekaan Tahapan ANT (Kolonial, abad ke-18– 1942)</b>	<b>Orde Lama (1945–1966)</b>	<b>Orde Baru (1966– 1998)</b>
<b>Enrolment</b>	<p>sebagai perantara narasi anti-kolonial, menarik aktor ke dalam proyek kebangsaan.</p> <p>Terbentuknya jaringan institusional melalui organisasi Islam dan media afiliasinya. Peran aktor menjadi relatif stabil: ulama sebagai sumber legitimasi, media sebagai kanal distribusi.</p>	<p>terbatas, tetapi tetap menjadi arena negosiasi makna politik-keagamaan.</p> <p>Ulama terdaftar sebagai aktor formal (legislatif, partai), sementara media terikat pada afiliasi politik. Enrolment bersifat kompetitif dan membuka ruang kontestasi ideologi.</p>	<p>melalui seleksi isu. Interessement terjadi melalui kompromi dengan struktur kekuasaan.</p> <p>Negara membatasi enrolment melalui institusi tunggal (PPP) dan regulasi media. Namun, aktor baru (ICMI, media populer) menciptakan konfigurasi jaringan alternatif dalam batas yang diizinkan.</p> <p>Mobilisasi dibatasi, tetapi tetap berlangsung secara laten. Menjelang reformasi, jaringan ulama–media bertransformasi menjadi kekuatan mobilisasi perubahan politik.</p>
<b>Mobilisasi</b>	<p>Jaringan berhasil memobilisasi resistensi kolektif; media memperluas jangkauan pesan ulama dan membangun solidaritas nasional-religius.</p>	<p>Mobilisasi bersifat ambivalen: ulama dan media dapat mendukung atau mengkritik negara. Jaringan lebih cair dan terbuka terhadap konflik ideologis.</p>	<p><b>Terkontrol namun resilien:</b> jaringan berada di bawah dominasi negara, tetapi bertahan melalui adaptasi dan re-konfigurasi hingga memicu transformasi sistemik.</p>
<b>Karakter Jaringan</b>	<p><b>Emergent dan resistif:</b> jaringan terbentuk dari bawah, dengan relasi simbiotik kuat antara ulama dan media sebagai co-constitutive actors.</p>	<p><b>Kontestatif dan dinamis:</b> jaringan terbuka, dengan negosiasi intens antara aktor negara, ulama, dan media.</p>	

**Sumber:** *Diolah penulis dengan pendekatan Actor-Network Theory berdasarkan interpretasi data historis dan dinamika jaringan ulama–media.*

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis menggunakan perspektif Actor-Network Theory (ANT), penelitian ini menyimpulkan bahwa ulama dan media massa bukanlah dua entitas terpisah dalam dinamika politik Indonesia, melainkan membentuk jaringan aktor yang saling terkait, saling membentuk, dan saling memperkuat melalui empat tahapan ANT: problematisasi, *interessement*, *enrolment*, dan mobilisasi.

Pada masa pra-kemerdekaan, jaringan ini bersifat revolusioner dengan kerja sama erat dalam melawan kolonialisme dan membangun kesadaran nasional, yang terwujud melalui pendirian media-media Islam, munculnya figur hybrid ulama-jurnalis, dan mobilisasi gerakan anti-kolonial yang masif. Pada masa Orde Lama, jaringan bersifat ideologis dan kompetitif, terlibat aktif dalam perdebatan ideologi negara melalui afiliasi partai politik Islam dengan media massa tertentu sehingga menghasilkan partisipasi elektoral yang signifikan. Pada masa Orde Baru, meskipun menghadapi pembatasan rezim otoriter, jaringan tetap eksis melalui strategi adaptif-defensif dengan berfokus pada isu sosial-keagamaan, dan pada akhirnya menjadi kekuatan pendorong reformasi 1998.

Pola relasi yang terbentuk bersifat simbiotik mutualistik, non-hierarkis, dan transformatif, di mana kekuasaan tidak terpusat pada satu aktor melainkan tersebar dan terus dinegosiasikan sesuai konteks politik yang berkembang. Dampaknya sangat signifikan, meliputi pembentukan kesadaran politik dan identitas nasional, pengaruh terhadap karakter sistem politik Indonesia yang unik, serta penciptaan pola partisipasi politik yang menempatkan agama dan mobilisasi massa sebagai variabel penting. Temuan ini mengonfirmasi bahwa pendekatan ANT mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang dinamika politik Indonesia. Penelitian ini merekomendasikan kajian lanjutan tentang transformasi jaringan ulama dan media massa pada era digital, serta kajian komparatif dengan negara-negara Muslim lainnya.

### **Ucapan Terima Kasih**

Penulis menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada

Masyarakat (LPPM) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta atas dukungan pendanaan yang diberikan melalui Program Penelitian Berbasis Pengembangan Program Studi tahun 2025, sehingga penelitian ini dapat diselesaikan dan dipublikasikan. Penghargaan khusus disampaikan kepada asisten peneliti, Nitra Galih Imansari, atas kontribusi, ketelitian, dan dedikasinya selama keseluruhan proses penelitian berlangsung. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada *Jurnal PROMEDIA (Public Relation dan Media Komunikasi)* atas kepercayaan dan kesempatan yang diberikan untuk mempublikasikan naskah ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, A. (2009). Fenomena Kiai dalam Dinamika Politik: Antara Gerakan Moral dan Politik. *KARSA Journal of Social and Islamic Culture*, 25–34. <https://doi.org/10.19105/karsa.v15i1.111>
- Ahmad, J. (2022). Analisis Keberhasilan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama (NU) Dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. *Ishlah: Jurnal Ilmu Ushuluddin, Adab Dan Dakwah*, 4(1), 93–110. <https://doi.org/10.32939/ishlah.v4i1.176>
- Anom, E. (2013). Regulasi dan Kebijakan Media Cetak di Indonesia Masa Zaman Penjajahan. *KOMUNIKOLOGI: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 10(2). <https://doi.org/10.47007/jkomu.v10i2.132>
- Anom, E., & Waluyo, D. (2011). Model dan Sistem Mengontrol Media di Indonesia (dari Perspektif Sejarah). *Masyarakat Telematika dan Informasi*, 2(1), 27–44.
- Anwar, I. (2020). Tulang punggung dipunggungi: Pecah kongsi numasyumi jelang pemilu 1955. *Al-Qalam*, 26(2), 353. <https://doi.org/10.31969/alq.v26i2.888>
- Araniri, N., Professor, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, Asmuni, A., Professor, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia, Djubaedi, D., & Professor, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Indonesia. (2023). The Role of Ulama for Developing Tolerant Islamic Education in Majalengka Regency's

- Multicultural Society. *International Journal of Social Science and Human Research*, 06(05).  
<https://doi.org/10.47191/ijsshr/v6-i5-19>
- Aritonang, A. (2022). Gerakan modern islam di indonesia 1900-1942. *Voice of HAMI: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1), 54–56. <https://doi.org/10.59830/voh.v5i1.42>
- Armansyah, Y. (2017). Dinamika Perkembangan Islam Politik di Nusantara: Dari Masa Tradisional Hingga Indonesia Modern. *FOKUS Jurnal Kajian Keislaman Dan Kemasyarakatan*, 2(1), 27. <https://doi.org/10.29240/jf.v2i1.149>
- Arnus, sri H. (2015). Jejak Perkembangan Sistem Pers Indonesia. *AL-MUNZIR*, (1), 106–116. <https://doi.org/10.31332/am.v8i1.770>
- Ashaf, A. F. (2006). Perlawanan Pers Islam pada Masa Orde Baru. *Mediator: Jurnal Komunikasi*, 7(1), 1–14. <https://doi.org/10.29313/mediator.v7i1.1212>
- Aspinall, E., Mietzner, M., & Institute of Southeast Asian Studies (Eds.). (2010). *Problems of democratisation in Indonesia: Elections, institutions, and society*. Institute of Southeast Asian Studies. Indonesia Update Conference.
- Baihaqi, W. (2019). Pengaruh Islam Terhadap Kekuasaan Politik di Indonesia. *ALQALAM*, 22(1), 1. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v22i1.1437>
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021a). Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), 641. <https://doi.org/10.3390/rel12080641>
- Barton, G., Yilmaz, I., & Morieson, N. (2021b). Authoritarianism, Democracy, Islamic Movements and Contestations of Islamic Religious Ideas in Indonesia. *Religions*, 12(8), 641. <https://doi.org/10.3390/rel12080641>
- Cahyani, M. G. (2023). Sejarah perkembangan pers dan pemanfaatan museum pers nasional sebagai media pembelajaran sejarah masa pergerakan nasional. *JEJAK : Jurnal Pendidikan Sejarah & Sejarah*, 3(1), 27–39. <https://doi.org/10.22437/jejak.v3i1.24651>
- Callon, M. (1984). Some Elements of a Sociology of Translation: Domestication of the Scallops and the Fishermen of St Brieuc Bay. *The Sociological Review*, 32(1\_suppl), 196–233. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954X.1984.tb00113.x>

- Creswell, J. W. (2017). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (Third edition). SAGE Publications.
- Djaelani, A. Q. (1994). *Peran Ulama dan santri Dalam Perjuangan Politik Islam di Indonesia*. PT.Bina Ilmu. (Surabaya- Jawa Timur).  
[//pustaka.nu.or.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D2167%26keywords%3D](http://pustaka.nu.or.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D2167%26keywords%3D)
- Efendi, A. (2020). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Alprin.
- Effendi, M. R. (2003). Pemikiran Politik Islam di Indonesia: Antara Simbolistik dan Substantivistik (Kajian PRA, Masa, dan Pasca Orde Baru). *Mimbar: Jurnal Sosial dan Pembangunan*, 19(1), 89–105.
- Effendy, B. (n.d.). *Islam and the State in Indonesia* | ISEAS Publishing. Retrieved June 4, 2025, from <https://bookshop.iseas.edu.sg/publication/235>
- Fealy, G., Institute of Southeast Asian Studies, & White, S. (Eds.). (2008). *Expressing Islam: Religious life and politics in Indonesia*. Institute of Southeast Asian Studies.
- Gorman, G. E., & Clayton, P. (2004). *Qualitative Research for the Information Professional: A practical handbook* (1st ed.). Facet. <https://doi.org/10.29085/9781856047982>
- Hamdan, H. (2019). Dialektika Wacana Islam dan Politik. *MITZAL (Demokrasi, Komunikasi dan Budaya): Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi*, 2(1). <https://doi.org/10.35329/mitzal.v2i1.263>
- Hasyim, S. (2023). *The shariatization of Indonesia: The politics of the Council of Indonesian Ulama (Majelis Ulama Indonesia, MUI)*. Brill. <https://doi.org/10.1163/9789004534896>
- Hidayat, A. (2019). Nahdhotul Ulama Pada Masa Pemerintahan Presiden Soekarno (1945-1966). *Herodotus: Jurnal Pendidikan IPS*, 2(3), 272–282. <https://doi.org/10.30998/herodotus.v2i3.9217>
- Hidayat, D. N. (Ed.). (2000). *Pers dalam "Revolusi Mei": Runtuhnya sebuah hegemoni*. Gramedia Pustaka Utama.
- Hidayatulloh, T., & Saumantri, T. (2023). The Harmony of Islam and Pancasila in Religious Discourse in Indonesia. *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati*, 3(1), 1–25. <https://doi.org/10.24235/sejati.v3i1.36>
- Hill, D. T. (1994). *The press in New Order Indonesia*. University of Western Australia Press in association with Asia Research

- Centre on Social, Political and Economic Change, Murdoch University.
- Hutagalung, I. (2013). Dinamika Sistem Pers di Indonesia. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2(2), 156–163. <https://doi.org/10.14710/interaksi.2.2.156-163>
- Imron. (2020). Pembredelan Pers Pada Masa Pemerintahan Orde Baru Dan Relevansinya Bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir. *Candi: Jurnal Pendidikan Dan Penelitian Sejarah*, 13(1), 143–159.
- Imron, R. (Corresponding A. (2022). From Political Parties to Cultural Organizations: Indonesian Islamic Movements during the New Order. *Journal of Al-Tamaddun*, 17(1), 43–53. <https://doi.org/10.22452/JAT.vol17no1.4>
- Indrawati. (2018). Transformasi Peran Ulama Indonesia Pada Era Indonesia Modern: Dari Orde Baru ke Orde Reformasi. *Tadrisuna : Jurnal Pendidikan Islam Dan Kajian Keislaman*, 1(1), 16–32.
- Jainuddin, J. (2019). Islam dan Politik Orde Lama: "Dinamika Politik Islam Paska Kolonial Sejak Kemerdekaan Sampai Akhir Kekuasaan Soekarno. *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, 3(2), 225–243. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v3i2.470>
- Kuntowijoyo, P. D. (2005). *Pengantar ilmu sejarah*. Benteng Pustaka.
- Kusuma, A. P. (2020). Relasi Ulama dan Penguasa Masa Kolonialisme. *JURNAL INDO-ISLAMIKA*, 8(2), 126–134. <https://doi.org/10.15408/idi.v8i2.17562>
- Latief, H. (2003). The Reinvigoration of Pesantren: The Social and Political Role of Kyai and Ulama in the Dutch Colonial Era. *Millah*, 3(1), 66–75. <https://doi.org/10.20885/millah.vol3.iss1.art4>
- Lavan, Y. O. (2021). Implementation of Islamic Values in Indonesia Political Dynamics. *Intelegensia : Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 53–66. <https://doi.org/10.34001/intelegensia.v9i1.2042>
- Lukmantoro, T. (2012). Peran Komunikasi Dalam Demokratisasi. *FORUM*, 40(1), 51–56.
- Lune, H., & Berg, B. L. (2017). *Qualitative research methods for the social sciences* (Ninth edition, global edition). Pearson.
- Martini, R. (2014). Analisis peran dan fungsi pers sebelum dan sesudah reformasi politik di Indonesia. *Jurnal Ilmu Sosial*, 13(2), 1–9.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (Edition 3). Sage.

- Mustika, R. (2018). Inovasi Teknologi Portal Intranet Kominfo: Perspektif Actor Network Theory. *Jurnal Komunikasi Indonesia*, 4(1), 38–47. <https://doi.org/10.7454/jki.v4i1.8877>
- Nasri'ah, A. (2024). *Potensi materi gerakan modern islam di indonesia awal abad ke-20 sebagai literatur penunjang buku teks / Ayisatun Nasri'ah* [Diploma, Universitas Negeri Malang]. <https://repository.um.ac.id/418975/>
- Padmo, S. (2012). Gerakan Pembaharuan Islam Indonesia dari masa ke masa: Sebuah pengantar. *Humaniora*, 19(2), 151–160. <https://doi.org/10.22146/jh.899>
- Peranginangin, I. F. D., Lubis, P. R., & Batubara, M. Q. (2025). Dinamika Media Massa dan Perubahan Sosial di Indonesia. *Komunikologi: Jurnal Pengembangan Ilmu Komunikasi Dan Sosial*, 9(2), 58. <https://doi.org/10.30829/komunikologi.v9i2.26943>
- Perdana, Y., & Pratama, R. A. (2022). *Sejarah pergerakan nasional Indonesia* (Cetak I). Penerbit Lakeisha.
- Qisthi Faradina Ilma Mahanani, Mega Alif Marintan, Irma Ayu Kartika Dewi, & Fuadi, M. A. (2022). Islam and Politics Indonesia (Historical Perspective). *Al-Isnad: Journal of Islamic Civilization History and Humanities*, 3(1), 61–69. <https://doi.org/10.22515/isnad.v3i1.5395>
- Ramadhani, N., Adiputri, C., & Febriani, I. (2024). Growth of Religious Organizations during Indonesia's National Recovery Period. *Holistic Science*, 4(1), 133–136. <https://doi.org/10.56495/hs.v4i1.558>
- Rasyid, M. N. (2019). Kapasitas ulama dalam bernegara. *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 590–597. <https://doi.org/10.32505/ikhtibar.v6i1.601>
- Rizha, F. (2018). Komunikasi politik dan politik media massa di Indonesia. *AT-TANZIR: JURNAL ILMIAH PRODI KOMUNIKASI PENYIARAN ISLAM*, 1–8.
- Rosyid, M. (2015). *Membingkai Sejarah Pers Islam di Tengah Terpaan Era Digital*. 1(1), 1–18. <https://doi.org/10.21043/at-tabsyir.v1i1.453>
- Safarudin, R., Zulfamanna, Z., Kustati, M., & Sepriyanti, N. (2023). Penelitian Kualitatif. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 9680–9694.
- Sayes, E. (2014). Actor–Network Theory and methodology: Just what does it mean to say that nonhumans have agency? *Social*

- Studies of Science*, 44(1), 134–149.  
<https://doi.org/10.1177/0306312713511867>
- Setiawan, A. M., Hasanah, U., & Nabilla. (2022). Jaringan Ulama: Penyebaran dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Nusantara. *Islamic Education*, 2(2), 6–13.  
<https://doi.org/10.57251/ie.v2i2.380>
- Siti Marwiyah. (2022). *Dinamika Politik Teori Komtemporer*. <http://repository.upm.ac.id/4000/1/DINAMIKA%20POLITIK%20TEORI%20KONTEMPORER%20%28alisyah%29.docx.pdf>
- Sujati, B. (2019). Peran Ayatullah Khomeini dalam Revolusi Islam di Iran 1979. *Rihlah: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan*, 7(1), 13–29. <https://doi.org/10.24252/rihlah.v7i1.7756>
- Triwardani, R. (2013). Pembreidelan Pers di Indonesia dalam Perspektif Politik Media. *Jurnal ILMU KOMUNIKASI*, 7(2). <https://doi.org/10.24002/jik.v7i2.191>
- Wahid, S. H., Kususiyanah, A., & Abdullah, F. (2025). Strengthening the Trust and Authority of Fatwa Institutions in the Digital Era: Lessons from Indonesia. *Journal of College of Sharia and Islamic Studies*, 43(2). <https://doi.org/10.29117/jcsis.2025.0425>
- Widiyanta, D., & Miftahuddin, M. (2024). Nasionalisme Indonesia Dalam Perubahan Masa Reformasi dan Tantangan Globalisasi. *MOZAIK Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 14(2), 196–208. <https://doi.org/10.21831/mozaik.v14i2.65836>
- Yatmin, Andyastuti, E., Lestaringrum, A., & Sumarwoto, M. I. Z. I. (2023). Instilling Nationalist Values from an Early Age Through the History of the Struggle of Indonesian Heroes. *International Journal of Educational Research Excellence (IJERE)*, 2(2), 564–576. <https://doi.org/10.55299/ijere.v2i2.713>
- Yudi Rusfiana & Ismail Nurdin. (2017). *Dinamika Politik Kontemporer*. Alfabeta.  
<http://eprints.ipdn.ac.id/2475/1/BUKU%20-%20DINAMIKA%20POLITIK%20KONTEMPORER.pdf>
- Zulianto, A., Atmaja, H. T., & Suharso, R. (2016). Perkembangan Persurat Kabar Suara Merdeka di Semarang Tahun 1950-2005. *Journal of Indonesian History*, 5(1). <https://journal.unnes.ac.id/journals>